

Judul : MKD belum tindaklanjuti laporan Setya Novanto  
Tanggal : Selasa, 21 Maret 2017  
Surat Kabar : Indo Pos  
Halaman : 3

## MKD Belum Tindaklanjuti Laporan Setya Novanto

JAKARTA-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) meragukan laporan terhadap Ketua DPR, Setya Novanto soal pelanggaran kode etik dalam dugaan kasus e-KTP. Oleh sebab itu, lembaga etik para wakil rakyat itu hingga saat ini belum memproses laporan tersebut.

Wakil Ketua MKD DPR RI, Syarifuddin Sudding menyatakan MKD belum memproses laporan pelanggaran kode etik Ketua DPR RI, Setya Novanto, karena pihaknya tengah memproses sidang panel Ruhut Sitompul. "Kita belum proses, MKD masih konsentrasi masalah panel Ruhut Sitompul," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/3).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu mengaku, laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Novanto itu perlu dikaji kembali oleh staf ahli MKD untuk keabsahannya. Terlebih, pihaknya pun terlebih dulu menunggu sidang yang berlangsung. "Kita belum ada tindak lanjut, biar masalah ini ditangani secara hukum, kita menunggu sidang dan melihat perkembangan lanjutan. Lebih baik menunggu hasil proses hukum," jelasnya.

Dibenarkan Ketua MKD DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Politisi Partai Gerindra itu menyebut, sudah ada tiga laporan terhadap Novanto terkait dengan kasus e-KTP. "Setiap laporan pasti akan kami terima dan setiap laporan pasti akan lakukan proses verifikasi. Saya nggak bisa bilang bahwa bisa ditindaklanjuti ketika proses hukumnya jalan, karena verifikasi belum selesai," ucap Dasco, kemarin.

Begitupun dengan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Dia menanggapi laporannya atas pelanggaran kode etik agar mendahulukan proses hukum yang berjalan terkait e-KTP. "Semuanya ada proses di pengadilan se-

dang berjalan, itu kita percayakan semuanya kepada pihak pengadilan yang semuanya sekarang ini sudah dilaksanakan. Saya menjunjung tinggi proses hukum, dan juga mendukung adanya reformasi hukum," ucapnya kemarin di Komplek Parlemen, Senayan.

Dia mengatakan, agar semua pihak menunggu proses persidangan yang tengah berlangsung. "Semua kita harapkan tidak ada intervensi dari siapapun dan tidak dijadikan polemik. Tentu nanti akan dilakukan semuanya dengan sebaiknya, termasuk saya selaku Ketua DPR RI menghargai semua apa yang dilakukan dari masalah yang ada di proses yang ada di pengadilan," papar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Diketahui, salah satu yang melaporkan Novanto ke MKD adalah LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Ketum Golkar itu dituduh telah melanggar kode etik karena berbohong dengan menyatakan tidak melakukan pertemuan khusus membahas proyek e-KTP dan tidak mengenal terdakwa dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto.

"Saya menjunjung tinggi proses hukum, dan juga mendukung adanya reformasi hukum, nah tentu apa yang dilakukan di persidangan, semua kita harapkan tidak ada intervensi dari siapa pun dan tidak dijadikan polemik-polemik," ucap Novanto.

Dia menyatakan, ingin fokus lebih dulu pada proses hukum e-KTP di pengadilan. Novanto enggan menanggapi lebih jauh soal pengaduan di MKD. "Tentu nanti akan dilakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, termasuk saya selaku Ketua DPR Indonesia menghargai semua apa yang dilakukan dari masalah-masalah yang ada, diproses yang ada di pengadilan," tutur dia. (aen)